

Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam Pendidikan Islam

Moh Masduki

IAI Sunan Giri Ponorogo

masdukigtg82@gmail.com

Abstract

This paper intends to discuss several issues related to community-based education in the view of Islamic education. There are two objects of study that are addressed in this discussion. First, the importance of community-based education in the present context. Second, discussing community-based education in the perspective of Islamic studies. This paper is a literature study where the author will discuss these two objects by digging data from written sources. From this discussion the following results are obtained: community-based education which is also called in several terms (adult education, non formal education, community base education) is still relevant to be implemented at this time. This is caused by several things: the lack of capacity of the community in developing countries to access formal education, formal education is felt not to solve the interests of society, the incessant issue of democratization in all fields, and the principle of lifelong education. Based on these things, community-based education is relevant to be developed to date. In the Islamic perspective the community has a responsibility also to educate and nurture members of its community, this is stated in several verses of the Qur'an which explain that humans are created as beings better than other creatures to always invite goodness and prohibit munkar. This explanation is contained in the letter Ali Imran verses 110 and 104. Historical facts also show that at the time of the Prophet Muhammad's Islamic education began with the community such as: friend's house, mosque, suffah, al-badiyah. In the current context of community education institutions in the form of majlis ta'lim, mosques, madrasa diniyah, skills courses all of which need to be revitalized as community-based education is still needed today.

Keywords: Education, Society, Islam.

A. Pendahuluan

Pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya merupakan ekspresi dari pendidikan yang memerdekakan atau pendidikan demokrasi yang menekankan kebebasan dalam proses pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi, dari pendidikan yang berorientasi pemerintah ke pendidikan yang berorientasi masyarakat. Jadi jika boleh dikatakan perputaran model pendidikan adalah sebagai berikut, pada awalnya bentuk pendidikan adalah berbentuk pendidikan berbasis masyarakat mulai dari tempat, metode, maupun perangkatnya, dengan hadirnya Negara maka pendidikan berubah menjadi melembaga dan kemudian terjadilah relasi kuasa yang dinilai mengekang sistem pendidikan, kemudian muncullah ide pendidikan yang membebaskan. Salah satunya bentuknya adalah pendidikan berbasis masyarakat. Azzumardi Azra menyatakan bahwa pendidikan Islam berbentuk pendidikan berbasis masyarakat pada awalnya, pendidikan ini berbentuk *rangkas, dayah, meunasah, surau, pesantren, diniyah*, dan dalam bentuk lainnya.¹

Pendidikan berbasis masyarakat seperti di atas memang telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat pengakuan dan termaktub dalam undang-undang Negara baru pada tahun 1989 yaitu undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional.

Penelitian ini hendak mengetengahkan tentang tetap dibutuhkannya keberadaan pendidikan berbasis masyarakat di tengah dunia modern yang penuh dengan lembaga-lembaga formal pendidikan, disertai dengan ulasan tentang pendidikan masyarakat dari sudut pandang Islam berdasarkan pada fakta historis maupun normatif.

B. Pendidikan Masyarakat Berbasis Pendidikan Islam

1. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat disebut juga dengan berbagai istilah, *adult education, continuing education, social education*, dan *non formal education*. Di Indonesia sendiri dikenal istilah PLS atau pendidikan luar sekolah sejak tahun 1953, hal ini ditandai dengan pernah dibukanya jurusan Pedagogik Sosial di fakultas Pedagogik Universitas Gajah Mada (UGM) untuk kemudian

¹ Azyumardi Azra, "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah" Makalah disampaikan pada konferensi Nasional Manajemen Pendidikan di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, Kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, hlm. 5-6.

hari fakultas ini melepaskan diri menjadi IKIP Yogyakarta.²

Pendidikan luar sekolah muncul diakibatkan adanya kegagalan lembaga formal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, baik kegagalan logistik maupun teknis, apalagi di Negara berkembang kebutuhan dan akses pendidikan dibutuhkan sedemikian besarnya akan tetapi jumlah lembaga formal tidak dapat mengimbangi jumlah kebutuhan itu. Karena itulah kemudian muncul pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan menjawab tantangan kehidupan yang kompleks.

Albert H. Yee mengungkapkan tentang fenomena pendidikan sepanjang hayat berpijak kepada masyarakat dari aspek psikologis dan kulturalnya. Dalam studinya di Amerika dan Hongkong menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa proses pertumbuhan dan pengasuhan terkait dengan perkembangan manusia dan hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya.³

Menurutnya belajar sepanjang hayat terjadi atas tiga tahap yakni tahap awal, tahap adolesen, dan masa tua. Tahap awal adalah tahap anak-anak, pada tahap ini suasana psikologis anak adalah “percaya dan tidak percaya”. Dalam tahap ini, keluarga dianggap mempunyai peran yang sangat penting. Tahap selanjutnya yaitu tahap adolesen atau tahap menuju dewasa. Dalam tahap ini keadaan yang menimpa individu adalah kebingungan untuk menemukan jati diri dan kebingungan peran. Dalam tahap ini, di samping keluarga sekolah mempunyai peran yang sangat penting. Pada tahap selanjutnya menurut pandangannya, agama menjadi pengaruh yang kuat. Dalam kasus di Hongkong dikatakan olehnya bahwa ajaran Konfusius dianggap sangat mempengaruhi kehidupan individu. Ajaran ini menekankan pentingnya pendidikan moral untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat seperti halnya loyalitas, kepatuhan, kasih sayang, tanggung jawab, dan persaudaraan.

Yukiko Sawano menegaskan bahwa dalam rangka menegaskan pendidikan sepanjang hayat. Negara Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya: pembentukan dewan belajar sepanjang hayat pada tingkat kabupaten, sedangkan wujud pelaksanaan belajar sepanjang hayat di Negara Jepang ini adalah : pendidikan sosial untuk para pemimpin, pengembangan kegiatan voluntir, kegiatan lingkaran masyarakat, pendidikan untuk wanita, dan program ekstensi. Pemerintah juga melakukan modifikasi kurikulum

² M Djauzi Moedzakir, *Pendidikan Luar Sekolah Revitalisasi Konsep*, Aditya Media Publishing, Malang; 2013, hlm. 5

³ Yee, Albert H, *A People Misruled; Hongkong and The Chinese Stepping Stone*, API Press, 1989, hlm. 19

pada beberapa tingkat sekolah meliputi; pengembangan peserta secara utuh, penekanan pada peserta didik, pengembangan belajar musyawarah, dan apresiasi budaya Jepang.⁴

a. Adult Education

Adult education atau pendidikan orang dewasa di Inggris biasa disebut dengan *education for adult*. Dalam deklarasi pendidikan orang dewasa di Hamburg tahun 1997 *adult education* diartikan sebagai:

*Entire body of ongoing learning processes, formal or otherwise, whereby people regarded as adults by the society to which they belong develop their abilities, enrich their knowledge, and improve their technical or professional qualifications or turn them in a new direction to meet their own needs and those of their society.*⁵

Pendidikan orang dewasa adalah proses pembelajaran yang berlangsung formal atau dalam bentuk lainnya, di mana orang dianggap sebagai orang dewasa oleh masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka, memperkaya pengetahuan mereka, dan meningkatkan kualifikasi teknis atau profesional mereka atau mengubahnya ke arah yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan orang-orang dari masyarakat mereka.

P. Jarvis mengatakan bahwa penyediaan pendidikan orang dewasa berfondasi atas penciptaan masyarakat yang demokratis. Namun ia juga mengingatkan bahwa masyarakat adalah terdiri atas manusia yang mempunyai sifat individual mereka bukanlah penerima pasif dari kebudayaan.⁶

Sebagai akibat dari perubahan besar dalam budaya masyarakat, penyediaan pendidikan orang dewasa dapat membantu orang untuk memahami proses yang terjadi dan membantu mereka untuk beradaptasi dan mengambil tempat mereka dalam masyarakat yang terus berubah.⁷

b. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat tumbuh atas dasar konsep pendidikan sepanjang hayat. Ini artinya pendidikan tidak selesai hanya dengan belajar

⁴ Yukiko Sawano, et.al, *International Handbook of Lifelong Learning*, Springer Science& Business Media, 2012, hlm. 28

⁵ Ibid. hlm. 15

⁶ Jarvis, Peter. *Adult and continuing education: Theory and practice*. Psychology Press, 1995. Hlm. 7

⁷ Jarvis, Peter. *Adult and continuing education: Theory and practice*. Psychology Press, 1995. Hlm. 7

di sekolah formal, apalagi tantangan dan masalah kehidupan berkembang demikian cepatnya. Masyarakat harus tetap belajar untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Pendidikan berbasis masyarakat berasumsi bahwa masyarakat mempunyai potensi dan fitrah untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri.⁸

Pendidikan berbasis masyarakat berdiri di atas prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dari masyarakat berarti bahwa suatu pendidikan dilakukan berdasar kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Oleh masyarakat berarti dalam proses pendidikan itu masyarakat berperan sebagai subyek pendidikan bukan sebaliknya sebagai obyek pendidikan. Untuk masyarakat berarti bahwa dalam pendidikan itu masyarakat diikutsertakan dalam pendidikan tersebut dalam rangka memecahkan masalah mereka juga.⁹

Pendidikan berbasis masyarakat atau disebut dengan *community based education* juga disemangati oleh arus perkembangan demokratisasi dalam segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan.¹⁰ Setidaknya dengan pendidikan berbasis masyarakat permasalahan-permasalahan pendidikan seperti diskriminasi, pendidikan mahal akan terpenuhi.¹¹

Dalam konteks Indonesia, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyebutkan bahwa :

“Pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.¹²

Dalam ayat 6 begitu juga ditegaskan bahwa :

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”.¹³

Berdasar atas undang-undang tersebut, sudah semestinya pendidikan dilakukan secara demokratis, otonomis serta desentralistik. Campur

⁸ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Melibatkan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta; Kencana Prenada Media, 2007, hlm. 21

⁹ Ibid. hlm. 131-132

¹⁰ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi terhadap Pelbagai Problem Sosial*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 130.

¹¹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Yogyakarta; Safiria Insania Press, 2003, hlm. 85

¹² Undang-Undang No. 20. Hlm. 12-13.

¹³ Undang-Undang No. 20. Hlm. 12-13.

tangan pemerintah yang dominan hanya akan menjerumuskan pendidikan ke arah politis, dikarenakan pendidikan bisa menjadi sebuah alat politik oleh suatu rezim yang sedang berkuasa. HAR. Tilaar juga menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan, melalui kurikulum penguasa akan berusaha menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.¹⁴ Kurikulum pendidikan kita bisa disebut sebagai anti realitas. Kurikulum pendidikan kita saat ini tidak berdasar pada kebutuhan warga belajar. Kurikulum pendidikan saat ini tidaklah berangkat dari suatu realitas masyarakat di mana akan semakin mencabut peserta didiknya dari lingkungan ia berada.

Proses pembelajaran dalam pendidikan model ini biasanya terjadi dengan keadaan sebagai berikut: 1) Proses belajar terjadi secara spontan dan alamiah, 2) belajar dengan melakukan atau *learning be doing* dan belajar berbasis pengalaman atau *experience based learning*, 3) melibatkan aktivitas mental dan fisik, 4) belajar berbasis kompetensi, 5) pemecahan masalah, 6) berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, 7) aktualisasi diri, 8) menyenangkan dan mencerdaskan, 9) produktif. Dari segi tujuannya, pendidikan masyarakat bertujuan untuk pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penanganan masalah kesehatan, dan sebagainya.¹⁵

2. Pendidikan Masyarakat dalam Pendidikan Islam

Sudah jelas dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya selain pemerintah, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab atas pendidikan. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Tripusat Pendidikan. Konsep itu berarti bahwa pendidikan akan dipengaruhi dan harus dilakukan oleh tiga setting yaitu : keluarga, masyarakat dan sekolah. Masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan pengetahuan seseorang. Masyarakat pedesaan misalnya akan membentuk pengetahuan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Begitu pula masyarakat industri akan berbeda dengan masyarakat petani. Oleh karenanya tidak heran jika akan kita temukan pengetahuan yang berbeda dari masing-masing masyarakat tersebut. Senada dengan pernyataan Surya, bahwa sikap dan nilai kebiasaan yang tertanam

¹⁴ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Cet. I; Magelang: Indonesiatera, 2003, hlm. 94

¹⁵ Zubadi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009 hlm. 132-133

dalam diri anak yang berasal dari desa dan kota akan berbeda.¹⁶

Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi; perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pelayanan. Masyarakat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga berhak menyelenggarakan pendidikan. Menurut Jamali pendidikan berbasis masyarakat ini bisa dilakukan dengan standar-standar tertentu, kurikulum, evaluasi, manajemen, dan pendanaannya harus sesuai dengan standar nasional. Lembaga penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat juga berhak dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah.¹⁷

Masyarakat mempunyai berbagai tanggung jawab yang terkait dengan pendidikan. Dalam tulisan Ihsan, dia menyatakan beberapa tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah : 1) mengawasi jalannya nilai sosio budaya, 2) menyalurkan aspirasi masyarakat, 3) membina dan meningkatkan kualitas keluarga.¹⁸

Dalam pandangan Islam setiap anggota masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan Islam sehingga terciptalah masyarakat yang Islami. Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Di dalam praktiknya, yang melaksanakan dan mengembangkan tanggung jawab ini adalah tokoh masyarakat, ketua masyarakat atau ulama sebagai lembaga informal masyarakat.¹⁹

a) Fakta Historis

Dalam Islam terlihat peran dan bentuk pendidikan berbasis masyarakat dari dua sisi yakni dilihat dari fakta historis dan normative. Dari sisi fakta historis terlihat dari sejarah pendidikan Islam di mana pada awalnya pendidikan Islam bermula dari rumah ke-rumah. Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau

¹⁶ H. M. Surya, dkk. *Kapita Selekta Kependidikan SD*, Jakarta; Universitas Terbuka; 2006, hlm.1. 23-1.25

¹⁷ M. Jamali, dkk. *Landasan Pendidikan*, Surakarta; Muhammadiyah University press, 2008, hlm.98

¹⁸ Fuad Ikhsan. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta; PT. RINEKA CIPTA, 2005, hlm. 86

¹⁹ Burhanuddin Abdullah. *Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Ilmu*, Yogyakarta; Pustaka Prisma, 2011, hlm. 88

pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu (ayat-ayat) Alquran kepada para pengikutnya. Selain itu Nabi juga menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Bahkan di sanalah Nabi beribadah (sholat) bersama sahabat-sahabatnya.²⁰

Ketika berada di Madinah, Nabi Saw. juga menyelenggarakan pendidikan di sebuah tempat khusus di dalam masjid bernama suffah. Selain itu juga nabi melakukan pendidikan dalam lembaga yang disebut sebagai kuttab dan al-badiyah. Masjid selain menjadi tempat shalat juga menjadi pusat kajian dan diskusi masalah-masalah ilmu keagamaan.²¹

Darul Arqam adalah lembaga pendidikan Islam pertama yang berada di Makkah yang keadaannya amat sederhana. Dengan menggunakan sebagian dari ruangan rumah milik seorang pengikut Rasulullah Saw. yang bernama al-Arqam al-Safa. Jumlah kaum muslimin yang hadir pada masa awal Islam saat itu masih sangat kecil, tetapi semakin bertambah hingga menjadi 38 orang yang terdiri dari para golongan bangsawan Quraisy, pedagang, dan hamba sahaya. Di *Dar al-Arqam*, Rasulullah Saw. mengajarkan wahyu yang telah diterimanya kepada kaum muslimin. Nabi juga membimbing mereka menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya.²²

Masjid selain berfungsi sebagai tempat melaksanakan shalat berjamaah, juga tempat melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan kaum Muslimun berpusat di masjid-masjid. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dijadikan sebagai tempat kegiatan pendidikan. Di dalam masjid Rasulullah mengajar dan memberi khotbah dalam bentuk halaqah di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Semakin luas wilayah Islam yang ditaklukkan Islam, semakin meningkat pula jumlah bilangan masjid yang didirikan. Di antara masjid yang dijadikan tempat pendidikan dan pengajaran Islam adalah Masjid Nabawi, Masjid al-Haram, Masjid Kufah, Masjid Bashrah, dan banyak lagi.²³

²⁰ Mahmud Yunus, Prof. Dr. H. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1992. Hlm. 6

²¹ Abuddin Nata, DR H. *Ilmu pendidikan islam*. Prenada Media, 2016. Hlm. 68-69

²² Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm : 193

²³ Ibid, hlm. 197

Al-Suffah merupakan ruangan atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Suffah dapat dilihat sebagai sebuah *boarding school*, karena kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara sistematis dan teratur. Sebagai contoh, Masjid Nabawi yang mempunyai Suffah digunakan untuk majelis ilmu. Lembaga ini juga menjadi semacam asrama bagi para pelajar yang tidak atau belum mempunyai tempat tinggal permanen. Mereka yang tinggal di Suffah disebut Ahl al-Suffah.²⁴

Kuttab didirikan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Namun demikian, lembaga pendidikan ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab. Hal ini terbukti dari sedikitnya orang-orang Arab yang menguasai baca tulis pada saat Islam datang. Mengajar keterampilan membaca dan menulis dilakukan oleh guru-guru yang mengajar secara sukarela. Rasulullah Saw. juga pernah memerintahkan tawanan Perang Badar yang mampu membaca dan menulis untuk mengajar sekitar sepuluh orang anak Muslim sebagai syarat membebaskan diri mereka tawanan.²⁵

Badiah adalah lembaga pendidikan yang mulai muncul pada zaman khalifah Bani Umayyah. Lembaga ini dibangun dalam rangka melaksanakan program arabisasi yang digagas khalifah Abdul Malik bin Marwan. Secara harfiah *badiah* artinya dusun Badui di Padang Sahara yang di dalamnya terdapat Bahasa Arab yang masih asli, fasih, dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Akibat dari Arabisasi ini, maka muncullah Ilmu Qawa'id dan cabang ilmu lainnya untuk mempelajari bahasa Arab. Melalui lembaga pendidikan ini, maka bahasa Arab dapat sampai ke Irak, Syria, Mesir, Libanon, Libia, Tunisia, Al-Jazair, Maroko, Saudi Arabia, Yaman, Emirat Arab dan sekitarnya. Dengan demikian maka banyak para penguasa yang mengirim anaknya untuk belajar bahasa Arab ke Badiah, bahkan banyak pula para ulama yang ikut belajar bahasa Arab di Badiah, seperti Khalid Ibn Ahmad (160 H/776 M). ia belajar ke Badiah yang ada di Hijaz, Nejed, dan Tihamah.²⁶

Paparan di atas merupakan fakta historis tentang pendidikan masyarakat dalam pendidikan Islam, selain fakta historis tersebut pendidikan berbasis masyarakat dalam Islam juga didukung dengan fakta normative yaitu beberapa dasar yang termaktub dalam kitab suci.

²⁴ Ibid, hlm. 197

²⁵ Ibid, hlm. 198

²⁶ Ibid, hlm, 198

b) Fakta Normatif

Oemar Mohammad Al-Toumy Al- Syaibany mengemukakan sebagai berikut: Diantara ulama-ulama mutakhir yang telah menyentuh persoalan tanggung jawab adalah Abbas Mahmud Al-Akkad yang menganggap rasa tanggung jawab sebagai salah satu ciri pokok bagi manusia pada pengertian Al-Qur'an dan Islam, sehingga dapat ditafsirkan manusia sebagai : “Makhluk yang bertanggung jawab.”²⁷

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran ; 110)”

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran ; 104)”

Dalam ayat tersebut Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran, jadi masyarakat pun harus mempunyai peran dalam mendidik dan mengarahkan anggota masyarakatnya untuk berbuat baik dan mengarahkannya dalam kebaikan. Kebaikan di sini dapat diartikan luas yakni bukan kebaikan dalam kehidupan akhirat saja akan tetapi kebaikan dalam urusan dunia juga.

Dalam masyarakat Islam anak orang lain pun dianggap sebagai anak sendiri, sehingga ketika memanggil seorang anak mereka akan memanggilnya dengan “wahai anak saudaraku”, dan sebaliknya anak-anak akan memanggil setiap orang tua dengan panggilan “wahai paman”.²⁸ Sejak awal Islam kaum muslimin telah merasakan tanggung jawab bersama untuk mendidik generasi muda, terdapatlah sebuah riwayat dari sahabat Anas, Al-Bukhori meriwayatkan:

Dahulu aku menjadi pelayan Nabi saw. aku selalu masuk ke rumah tanpa izin. Suatu hari aku dating, maka beliau bersabda : “Hai anakku bagaimana kamu ini, sesungguhnya suatu persoalan benar-benar telah terjadi sesudah ini. Jangan sekali-kali kamu masuk tanpa meminta

²⁷ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara; 2012, hlm. 44-45

²⁸ Abdurrahman Annahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 177

*izin” dari gambaran di atas Rasulullah saw. telah mengajari Anas untuk meminta izin dan memanggilnya dengan rasa kekeluargaan “wahai anakku”.*²⁹

Dalam pendapat Abdurrahman An-Nahlawi bahwa masyarakat dapat melakukan pembinaan atau pendidikan melalui pengisolasian, pemboikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan, Nahlawi menambahkan bahwa Rasulullah saw. menjadikan masyarakat sebagai sarana membina umat, Beliau menyuruh para sahabat untuk memutuskan hubungan dengan tiga anggota masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan keprajuritan. Pembinaan melalui tekanan masyarakat yang tujuannya jelas untuk kebaikan merupakan sarana yang efektif.³⁰

C. Penutup

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang sejak dahulu sudah ada. Raminya pendidikan yang melembaga dalam bentuk formal saat ini pendidikan berbasis masyarakat justru dibutuhkan dengan berbagai kelebihanannya diantaranya; fleksibel, demokratis, lebih mengetahui permasalahan masyarakat, dan berbagai kelebihan lainnya. Dalam sejarah Islam ditemukan bahwa pendidikan Islam pada mulanya juga berbasis masyarakat, masjid, rumah sahabat, bahkan sebuah kampung pun dijadikan sebagai sarana pendidikan. Dalam teks wahyu pun tertuang bahwa pendidikan juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

²⁹ Ibid. hlm. 177

³⁰ Ibid. hlm. 178

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Annahlawi. (1996). *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta; Gema Insani Press).
- Abuddin Nata, DR H. (2016). *Ilmu pendidikan islam*. (Prenada Media)
- Abuddin Nata, (2012). *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, (Jakarta; Rajawali Pers).
- Azyumardi Azra, (2013). “Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah” Makalah disampaikan pada konferensi Nasional Manajemen Pendidikan di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, M Djauzi Moedzakir, *Pendidikan Luar Sekolah Revitalisasi Konsep*, (Aditya Media Publishing, Malang)
- Burhanuddin Abdullah. (2011). *Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Ilmu*, (Yogyakarta; Pustaka Prisma),
- Dede Rosyada, (2007). *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Melibatkan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta; Kencana Prenada Media)
- Fuad Ikhsan. (2005). *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta; PT. RINEKA CIPTA)
- H. M. Surya, dkk. (2006). *Kapita Selekta Kependidikan SD*, (Jakarta; Universitas Terbuka)
- H.A.R. Tilaar, (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Cet. I; (Magelang: Indonesiatara)
- Jarvis, Peter. (1995). *Adult and continuing education: Theory and practice*. (Psychology Press)
- M. Jamali, dkk. (2008). *Landasan Pendidikan*, (Surakarta; Muhammadiyah University press)
- Mahmud Yunus, Prof. Dr. H. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung)
- Mastuhu, (2003). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, (Yogyakarta ; Safiria Insania Press)

Zakiah Daradjat, dkk, (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara).

Zubaedi, (2009). *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar)

Zubaedi, (2007). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi terhadap Pelbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar)